

Bab IV

KALIMAT DALAM KARANGAN ILMIAH

A. Pengantar

Penggunaan kalimat dalam karangan ilmiah harus memenuhi ketentuan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik merupakan bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan konteks berbahasa dan selaras dengan nilai sosial masyarakat, sedangkan bahasa Indonesia yang benar merupakan bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia (lih. Perpres No. 63 Tahun 2019 Pasal 2 butir (2) dan (3)). Kaidah bahasa Indonesia yang benar meliputi kaidah tata bahasa (kata dan kalimat), kosakata (termasuk istilah), ejaan, dan makna (lih. Sugono, 2009: 22).

Penggunaan kalimat dalam karangan ilmiah harus memenuhi ketentuan penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Kalimat dalam karangan ilmiah yang memenuhi ketentuan tersebut adalah kalimat baku dan kalimat efektif.

B. Kalimat Baku

Kalimat-kalimat yang digunakan dalam karangan ilmiah harus kalimat baku. Kalimat baku adalah kalimat yang dianggap benar, baik struktur kalimat, tata bentuk kata, koskata, maupun tata ejaannya (bdk. Soegiarta, 1984: 60). Oleh karena itu, kalimat baku harus memiliki empat syarat yang saling melengkapi.

Pertama, struktur kalimat baku harus sesuai dengan struktur kalimat bahasa Indonesia yang benar. Kalimat yang lengkap setidaknya terdiri atas subjek (S) dan predikat (P). Subjek adalah bagian kalimat yang berfungsi sebagai pangkal pembicaraan, sedangkan predikat adalah bagian kalimat yang menerangkan sesuatu yang disebut oleh subjek (Arifin dan Amran, 1990: 114, 103). Dalam pola dasar kalimat dalam bahasa Indonesia, subjek terletak di sebelah kiri atau di muka predikat. Contohnya sebagai berikut.

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia (S) negara hukum (P).
- (2) Anak itu (S) menangis (P).
- (3) Keadilan itu (S) tidak nyata (P).

Dalam kalimat (1)–(3) tersebut, *Negara Kesatuan Republik Indonesia*, *anak itu*, dan *keadilan itu* adalah S karena terletak di muka P, sedangkan *negara hukum*, *menangis*, dan *tidak nyata* adalah P. Jadi, struktur kalimat baku harus benar.

Di samping strukturnya benar, suatu kalimat disebut kalimat baku apabila unsur-unsur pembentuknya lengkap. Contoh (1)–(3) tersebut memenuhi syarat sebagai kalimat baku karena strukturnya benar dan unsur-unsur pembentuknya lengkap, yaitu S dan P. Namun, perhatikanlah contoh (4) berikut ini.

- (4) Kebiasaan hidup masyarakat yang berasal dari tindakan-tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan hukum.

Predikat dalam kalimat (4) tersebut tidak jelas karena disisipi kata *yang*. Predikat tersebut akan jelas bila kata *yang* dihilangkan sehingga menjadi sebagai berikut.

- (4a) Kebiasaan hidup masyarakat yang berasal dari tindakan-tindakan dalam kehidupan sehari-hari (S) mencerminkan (P) hukum.

Dari kalimat (4a) jelaslah bahwa *kebiasaan hidup masyarakat yang berasal dari tindakan-tindakan dalam kehidupan sehari-hari* adalah S, sedangkan *mencerminkan* adalah P. Hanya saja, di sebelah kanan atau di belakang P masih ada kata *hukum*. Kata *hukum* tersebut berfungsi sebagai objek (O) karena P-nya, yaitu *mencerminkan*, berupa kata kerja transitif berimbuhan *me-kan*. Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja aktif yang jika berfungsi sebagai P memerlukan objek. Jadi, struktur kalimat (4a) yang benar adalah S-P-O seperti terlihat dalam (4b) berikut.

- (4a) Kebiasaan hidup masyarakat yang berasal dari tindakan-tindakan dalam kehidupan sehari-hari (S) mencerminkan (P) hukum (O).

Di samping berpola S-P (seperti contoh (1)–(3)) dan S-P-O (seperti dalam (4b)), kalimat dalam bahasa Indonesia dapat pula berpola Subjek-Predikat-Pelengkap (S-P-Pel) dan Subjek-Predikat-Keterangan (S-P-Ket). Contohnya sebagai berikut.

- (5) Indonesia (S) adalah (P) negara hukum (Pel).
- (6) Masalah hukum (S) timbul (P) di semua kalangan (Ket).

Kata *negara hukum* dalam kalimat (5) adalah pelengkap (Pel) karena hadir demi kelengkapan kalimat (5) bukan karena kata kerjanya bukan kata kerja aktif transitif. Sementara itu, *di semua kalangan* dalam kalimat (6) adalah keterangan (Ket) tidak wajib hadir sehingga dapat dihilangkan dan dapat dipindahkan ke awal kalimat.

- (6a) Masalah hukum (S) timbul (P).
- (6b) Di semua kalangan (Ket), masalah hukum (S) timbul (P).

Terkait dengan (6b), untuk menghindari salah baca atau salah pengertian, setelah Ket *di semua kalangan*, ditambahkan tanda koma (,).

Hal lain yang perlu diperhatikan pula bahwa dalam kalimat baku, subjek (S) dan objek (O) tidak boleh didahului oleh kata depan, seperti *tentang, mengenai, untuk, bagi, di, dan dalam*. Contohnya sebagai berikut.

- (7) *Di kalangan masyarakat* sering sekali melanggar peraturan yang sebenarnya sudah mereka ketahui.
- (8) RUU Cipta Kerja dinilai kurang menguntungkan *bagi para buruh*.

Subjek dalam kalimat (7) tidak jelas karena didahului kata depan *di*. Demikian pula, objek (O) dalam kalimat (8) juga tidak jelas karena didahului oleh kata depan *bagi*. Subjek dan Objek tersebut akan jelas jika kata depannya dihilangkan sehingga kalimatnya menjadi sebagai berikut.

- (7a) *Kalangan masyarakat* sering sekali melanggar peraturan yang sebenarnya sudah mereka ketahui.
- (8a) RUU Cipta Kerja dinilai kurang menguntungkan *para buruh*.

Jadi, dari kalimat (7a) dan (8a) tersebut dapat diketahui bahwa S dalam kalimat (7) adalah *kalangan masyarakat* dan O dalam kalimat (8) adalah *para buruh*.

Kedua, penggunaan kata bentukan dalam kalimat baku harus sesuai dengan kaidah pembentukan kata yang benar. Perhatikanlah kata *mempengaruhi* dan *mensejahterakan* dalam kalimat berikut.

- (9) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat *mempengaruhi* ketaatan dan penegakan hukum.
- (10) Hukum bukan alat politik, melainkan alat untuk *mensejahterakan* rakyat.

Kata *mempengaruhi* dalam kalimat (9) tersebut merupakan kata berimbuhan yang dibentuk dari imbuhan *me-* dan kata dasar *pengaruh*. Menurut kaidah pembentukan kata, jika imbuhan *me-* dilekatkan pada kata dasar yang berhuruf awal *p*, imbuhan *me-* berubah menjadi *mem-* dan huruf awal *p* luluh. Contoh lainnya sebagai berikut.

| | | | | |
|------------|---|---------------|---------|-----------------|
| <i>me-</i> | + | <i>potong</i> | menjadi | <i>memotong</i> |
| <i>me-</i> | + | <i>patung</i> | menjadi | <i>mematung</i> |
| <i>me-</i> | + | <i>pahat</i> | menjadi | <i>memahat</i> |

Namun, jika imbuhan *me-* dilekatkan pada kata dasar yang berhuruf awal rangkap, yaitu *pr*, imbuhan *me-* berubah menjadi *mem-*, tetapi huruf awal *pr* tidak luluh. Contohnya sebagai berikut.

| | | | | |
|---------------|---|------------------|---------|----------------------|
| <i>me-i</i> | + | <i>prakarsai</i> | menjadi | <i>memprakarsai</i> |
| <i>me-kan</i> | + | <i>praktik</i> | menjadi | <i>mempraktikkan</i> |

Jadi, hasil bentukannya bukan *mempengaruhi*, melainkan *memengaruhi*.

- (9a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat *memengaruhi* ketaatan dan penegakan hukum.

Kata *mensejahterakan* dalam kalimat (10) juga merupakan kata bentukan yang salah. Kata bentukan yang benar adalah *menyejahterakan*. Alasannya, menurut kaidah pembentukan kata, jika imbuhan *me-* ditambahkan pada kata yang berhuruf awal *s*, imbuhan *me-* berubah menjadi *meny-* dan huruf awal *s* luluh.

- (10a) Hukum bukan alat politik, melainkan alat untuk *menyejahterakan* rakyat.

Ketiga, kosakata dalam kalimat baku harus berupa kata baku. Kata baku adalah kata yang dianggap sebagai patokan kata yang benar (Soegiarta, 1984: 66). Kata baku tidak berupa kata percakapan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut.

- (11) Integritas dan moralitas aparat penegak hukum harus baik *lantaran* mereka sangat rentan untuk praktik penyuapan dan penyalahgunaan wewenang.
- (12) Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hukum dapat *dibilang* kurang.
- (13) Protokol kesehatan hampir 2 tahun diterapkan, *tapi* masih banyak orang yang tidak mematuhi.

Kata *lantaran*, *dibilang*, dan *tapi* tersebut tidak baku karena keduanya merupakan kata percakapan sehari-hari. Bentuk baku kata *lantaran* adalah *karena* atau *sebab*, bentuk baku kata *dibilang* adalah *dinyatakan* atau *dikatakan*, sedangkan bentuk baku kata *tapi* adalah *tetapi*.

- (11a) Integritas dan moralitas aparat penegak hukum harus baik *karena* mereka sangat rentan untuk praktik penyuapan dan penyalahgunaan wewenang.
- (11b) Integritas dan moralitas aparat penegak hukum harus baik *sebab* mereka sangat rentan untuk praktik penyuapan dan penyalahgunaan wewenang.
- (12a) Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hukum dapat *dinyatakan* kurang.
- (12b) Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hukum dapat *dikatakan* kurang.
- (13a) Protokol kesehatan hampir 2 tahun diterapkan, *tetapi* masih banyak orang yang tidak mematuhi.

Syarat keempat, kalimat baku menggunakan ejaan baku bahasa Indonesia. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandardisasikan (Kridalaksana, 2008: 54). Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (KKBPPB) No. 0321/I/BS.00.00/2021 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, pedoman ejaan baku bahasa Indonesia yang berlaku adalah *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia* (PUEBI).

Dalam PUEBI dibentangkan empat pedoman, yaitu pedoman pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Perhatikanlah contoh berikut.

- (14) Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja, di mana saja, dan dalam wilayah Negara tertentu, tanpa membeda-bedakan.

Dalam contoh tersebut terdapat kesalahan pemakaian huruf kapital *N* pada kata *Negara*, penulisan unsur serapan *kaedah*, dan pemakaian tanda baca koma (.). Karena bukan nama atau tidak diikuti oleh nama, kata *negara* tidak perlu ditulis dengan huruf awal kapital. Karena *kaedah* merupakan unsur serapan dari bahasa Arab *qā'idah*, penyerapannya menjadi *kaidah*. Dalam contoh tersebut, tanda koma (,) sesudah kata *tertentu* tidak perlu dipakai. Jadi, tata tulis contoh (15) dapat diperbaiki menjadi sebagai berikut.

- (14a) Karakteristik hukum sebagai *kaidah* selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja, di mana saja, dan dalam wilayah *negara* tertentu tanpa membeda-bedakan.

C. Kalimat Efektif

Kalimat-kalimat dalam karangan ilmiah harus efektif. Badudu (1986: 129) berpendapat bahwa

“sebuah kalimat dikatakan efektif apabila mencapai sasarannya dengan baik sebagai alat komunikasi. Ada dua pihak yang terlibat, yaitu yang menyampaikan pesan dan yang menerima, dan di luar itu, ada yang disampaikan yang berupa gagasan, pesan, pemberitahuan, dan sebagainya. Kalimat yang efektif dapat menyampaikan pesan, gagasan, ide, pemberitahuan itu kepada si penerima sesuai dengan yang ada dalam benak si penyampai.”

Jadi, hal yang penting dalam kalimat efektif bukan panjang pendeknya kalimat, melainkan informasinya mudah dipahami (bdk. Sasangka, 2014: 54).

Kalimat efektif haruslah memenuhi syarat sebagai kalimat yang baik (Badudu, 1986: 129). Kalimat efektif setidaknya-tidaknya memiliki lima ciri yang saling melengkapi, yaitu kelengkapan, kehematan,

kelogisan, kesejajaran, dan ketepatan (bdk. Adidarmodjo, 1989: 127; Sasangka, 2014: 55).

1. Kelengkapan Unsur Kalimat

Unsur-unsur pembentuk kalimat adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat yang lengkap setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Contohnya sebagai berikut.

(15) Disrupsi merupakan inovasi teknologi.

Contoh (15) merupakan kalimat karena unsur-unsur pembentuknya lengkap. Unsur-unsur pembentuk kalimat (15) adalah *disrupsi* sebagai subjek, *merupakan* sebagai predikat, dan *inovasi teknologi* sebagai keterangan. Oleh karena itu, contoh (15) tersebut merupakan kalimat efektif karena unsur-unsur pembentuknya lengkap. Namun, bagaimana dengan contoh berikut ini?

(16) Saat ini Grab tersedia di 125 kota di seluruh Indonesia.

Mulai dari Banda Aceh di Aceh hingga Jayapura di Papua.

(17) Banyak macam kejahatan di masyarakat.

Deretan kata bercetak miring dalam contoh (16) dan (17) belum merupakan kalimat karena tidak jelas subjek dan predikatnya. Deretan kata tersebut akan menjadi kalimat bila diubah menjadi (16a) dan (17a) berikut.

(16a) Saat ini Grab tersedia di 125 kota di seluruh Indonesia,
mulai dari Banda Aceh di Aceh hingga Jayapura di Papua.

(17a) Banyak macam kejahatan ada di masyarakat.

Pada (16a) tampak jelas bahwa deretan kata *mulai dari Banda Aceh di Aceh hingga Jayapura di Papua* berfungsi sebagai keterangan tambahan untuk *di seluruh Indonesia*. Sementara itu, identitas deretan kata dalam (17a) juga menjadi jelas bahwa deretan kata tersebut merupakan kalimat karena terdiri atas subjek, yaitu *banyak kejahatan*; predikat, yaitu *ada*; dan keterangan, yaitu *di masyarakat*. Jadi, suatu kalimat disebut kalimat efektif bila unsur-unsur pembentuknya lengkap.

2. Kehematan Unsur Kalimat

Kehematan sangat diperlukan dalam kalimat efektif. Oleh karena itu, pemakaian kata yang tidak perlu harus dihindari. Contohnya sebagai berikut.

- (18) Inflasi juga sangat berkaitan dengan *purchasing power* atau daya beli *dari* masyarakat.

Pemakaian kata *dari* dalam contoh tersebut tidak perlu sehingga lebih baik dibuang.

- (18a) Inflasi juga sangat berkaitan dengan *purchasing power* atau daya beli masyarakat.

Sementara itu, pemakaian kata *maka* dalam dua kalimat berikut juga tidak perlu.

- (19) Dengan arahan-arahan dan perencanaan kepada semua elemen masyarakat, *maka* perekonomian di Indonesia akan dapat semakin membaik.
 (20) Jika tidak dikelola dengan baik, *maka* kebutuhan hidup yang kita miliki sejak kita lahir akan menemukan sebuah ketidakteraturan dalam hidup.

Alasannya adalah kata *maka* dalam kalimat (19) tidak mempunyai fungsi apa-apa, sedangkan dalam kalimat (20) justru akan mengaburkan identitas kalimat majemuk bertingkat. Oleh karena itu, kata *maka* dalam kedua contoh tersebut lebih baik dihilangkan.

- (19a) Dengan arahan-arahan dan perencanaan kepada semua elemen masyarakat, perekonomian di Indonesia akan dapat semakin membaik.
 (20a) Jika tidak dikelola dengan baik, kebutuhan hidup yang kita miliki sejak kita lahir akan menemukan sebuah ketidakteraturan dalam hidup.

3. Kelogisan Kalimat

Kalimat efektif harus logis dan lazim. Suatu kalimat dikatakan logis apabila sesuai dengan logika; benar menurut penalaran; masuk akal. Contohnya sebagai berikut.

- (21) Mohon maaf, saya datang terlambat. *Jalannya macet.*

Kalimat *Jalannya macet.* lazim dijumpai dalam komunikasi, padahal kalimat itu tidak logis. Dalam kalimat itu, kata *macet* berarti 'terhenti, tidak lancar'. Jalan macet jelas tidak akan ada, tetapi yang ada adalah kendaraan terhenti, tidak lancar. Jadi, yang macet bukan jalannya melainkan lalu lintasnya sehingga kalimat tersebut harusnya diubah menjadi *Lalu lintas macet.*

4. Kesejajaran Unsur-Unsur Kalimat

Sering kali terjadi dijumpai kalimat yang berisi perincian. Namun, perincian yang dibuat tidak disajikan secara sejajar atau paralel. Contohnya sebagai berikut.

- (22) Tujuan akuntansi pada dasarnya adalah untuk melakukan pencatatan, mengumpulkan, dan melaporkan informasi terkait keuangan, kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis.
- (23) Penerapan hukum yang adil dan tegas bagi setiap pelaku serta membangun lingkungan yang jujur akan menjauhkan kita dari korupsi.

Pada contoh (22) terdapat perincian yang tidak sejajar atau paralel, yaitu pada bagian *melakukan pencatatan, mengumpulkan, dan melaporkan informasi*. Agar efektif, bagian yang tidak paralel tersebut harus diparalelkan menjadi sebagai berikut.

- (22a) Tujuan akuntansi pada dasarnya adalah untuk melakukan *pencatatan, pengumpulan, dan pelaporan* informasi terkait keuangan, kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis.

- (22b) Tujuan akuntansi pada dasarnya adalah untuk *mencatat, mengumpulkan, dan melaporkan* informasi terkait keuangan, kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis.

Dalam contoh (23) juga terdapat perincian yang tidak sejajar, yaitu kata *penerapan* dan *membangun*. Untuk menjadi kalimat efektif, ketidaksejajaran tersebut harus disejajarkan menjadi sebagai berikut.

- (23a) *Penerapan* hukum yang adil dan tegas bagi setiap pelaku serta *pembangunan* lingkungan yang jujur akan menjauhkan kita dari korupsi.

5. Ketepatan Urutan Kata dan Pilihan Kata

Sering kali dijumpai kalimat dalam karangan yang susunannya tidak tepat. Contohnya sebagai berikut.

- (24) Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan *banyak terima kasih*.
 (25) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut *besar kemungkinan* peternakan satwa liar di China menjadi sumber pandemi Covid-19.

Urutan kata *banyak terima kasih* dan *besar kemungkinan* dalam contoh tersebut tidak tepat karena susunan kata dalam bahasa Indonesia mengikuti urutan Diterangkan-Menerangkan (DM), yaitu kata yang diterangkan terletak di depan kata yang menerangkan. Jadi, urutan kata yang tepat adalah *terima kasih banyak* dan *kemungkinan besar*.

Penggunaan kata secara tepat di dalam kalimat sangat penting karena setiap kata memiliki makna. Jika tidak dipakai secara tepat, makna kata itu menjadi tidak tepat pula. Contohnya sebagai berikut.

- (26) Di Indonesia dampak di sektor ekonomi dari virus ini sangat terasa *disebabkan* banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pengurangan karyawan yang *disebabkan karena* berkurangnya pendapatan di tempat mereka bekerja.

Penggunaan kata *disebabkan* dan *karena* dalam kalimat (26) tersebut tidak tepat. Kata *disebabkan* seharusnya *karena* dan kata *karena* seharusnya *oleh*.

- (26a) Di Indonesia dampak di sektor ekonomi dari virus ini sangat terasa *karena* banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pengurangan karyawan yang disebabkan *oleh* berkurangnya pendapatan di tempat mereka bekerja.

DAFTAR RUJUKAN

- Adidarmodjo, Gunawan Wibisono. (1989). *Renda-Renda Bahasa*. Bandung: Angkasa.
- Arifin, E. Zaenal dan S. Amran Tasai. (1991). *Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Mediyatama Sarana Perkasa.
- Badudu, J.S. (1986). *Inilah bahasa Indonesia yang Benar II*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kridalaksana, Harimurti. (2008). *Kamus Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.
- Sasangka, Sry Satriya Tjatur Wisnu. (2014). *Kalimat*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Soegiarto. (1984). *Glosaria Istilah Bahasa dan Sastra*. Klaten: Intan.
- Sugono, Dendy. (2009). *Mahir Berbahasa Indonesia dengan Benar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.